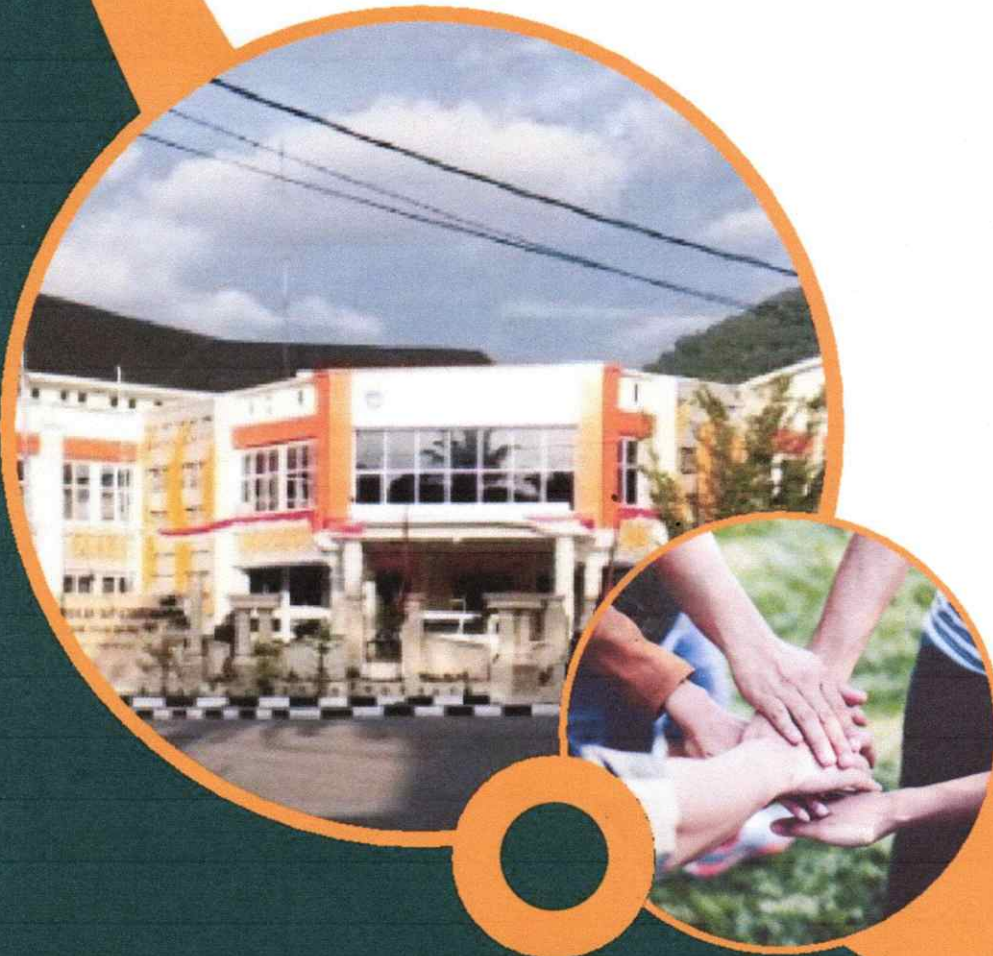




DISDIKBUD PESSEL

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2024



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025



<https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>



(0756) 21502



@perencanaan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, 05 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si

NIP.19701107 199702 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Dasar Hukum.....	4
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	5
E. Struktur Organisasi.....	6
F. Sumber Daya Manusia.....	8
G. Isu Strategis.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
I. Ikhtisar Eksekutif.....	13
BAB II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	15
C. Indikator Kinerja Utama.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	19
A. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Tahun 2024.....	19
B. Hasil Pengukuran Kinerja dan Tabel Hasil Pengukuran Kinerja.....	20
C. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	21
D. Akuntabilitas Keuangan.....	31
BAB IV Penutup.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	35
Lampiran.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 22 menyatakan bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban tersebut diatas selanjutnya disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan, yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2024.

Tujuan penyusunan LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj tahun 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
- b) Aspek Manajemen Kinerja : bagi keperluan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjadikan LKj 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- g) Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- h) Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagai evaluasi kinerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yang

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mengevaluasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan, tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang -undangan.

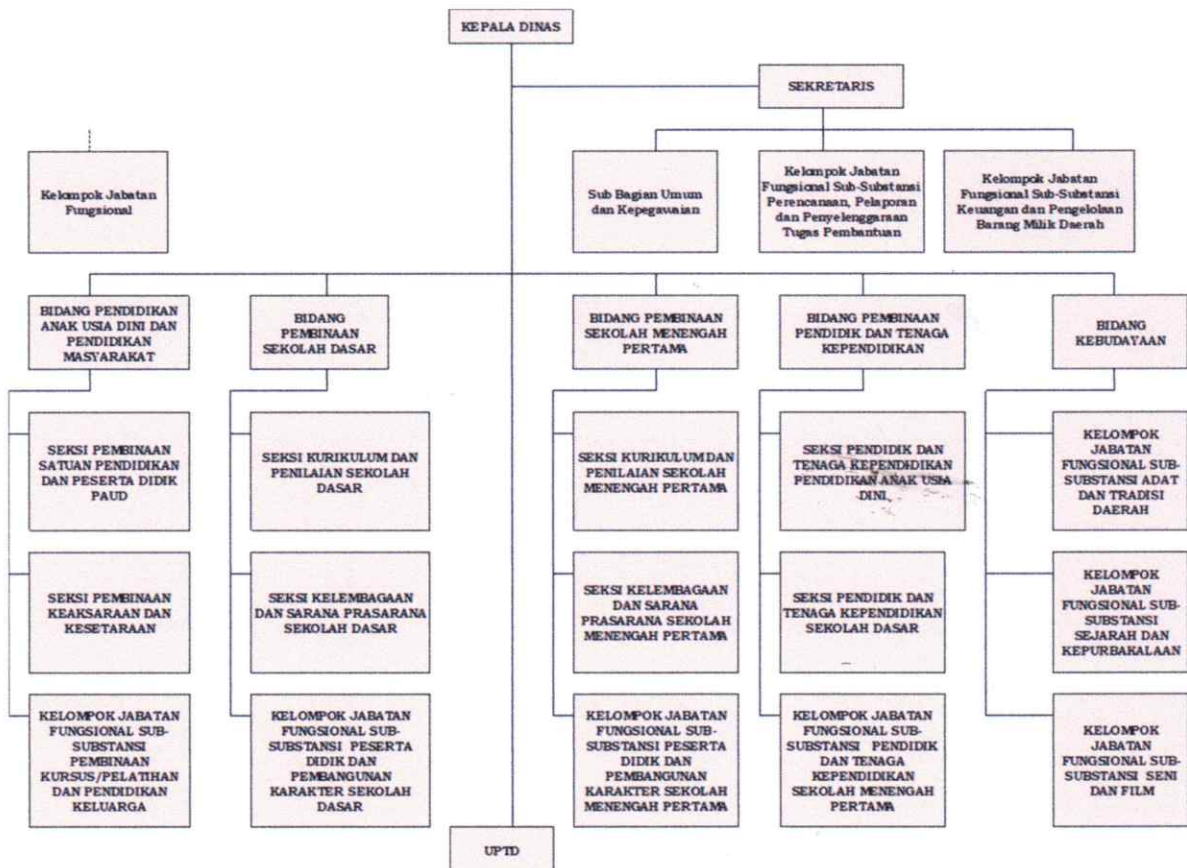
E. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;

- b. Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga.
- 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Adat dan Tradisi Daerah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Film;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Keperbukalan
- 6. UPT

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



F. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 52 orang, berikut disajikan data pegawai berdasarkan jabatan, eselon, kualifikasi pendidikan dan golongan seperti tabel di bawah :

Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	16	38,10
2	Fungsional Tertentu	11	26,19
3	Fungsional Umum	15	35,71
	Jumlah	42	100,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	9

No	Eselon	Jumlah
4	Fungsional Tertentu	11
5	Fungsional Umum (Staf)	15
	Jumlah	42

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Tabel 1.3. Data Pegawai Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	9
2	Strata 1 (S1)	25
3	Diploma 3 (D3)	4
4	SLTA	4
	Jumlah	42

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	13
2	Golongan III	22
3	Golongan II	7
	Jumlah	42

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

G. Isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Pencapaian tujuan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu Kepala Daerah dalam

bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan dua urusan terkait pendidikan dan kebudayaan. Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini Dinas bertugas terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap pendidikan dasar (PAUD, SD, dan SMP, serta Kesetaraan). Disamping itu juga membantu mewujudkan satu misi kepala daerah misi ke 5 yaitu : **"Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing"**.

Urusan kebudayaan membantu dalam mewujudkan meningkatkan peran objek wisata dalam pembangunan ekonomi daerah mendukung kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pencapaian misi ke 4 yaitu : **"Mewujudkan Kabupaten pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan"**.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Distribusi tenaga pendidik yang belum merata dan proporsional sesuai kebutuhan bidang studi (SMP);
- b) Kondisi sarana dan prasarana sekolah masih ada yang kurang maupun dalam kondisi rusak;
- c) Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan;
- d) Keterbatasan akses internet di beberapa kecamatan guna mendukung pembelajaran jarak jauh;
- e) Keterbatasan sumber daya dalam mengelola kebudayaan.

Berkaitan dengan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang pendidikan dan pengembangan kebudayaan, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi isu strategi

sebagai berikut :

a) Rendahnya Kualitas Pendidikan

Sektor pendidikan dilingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki permasalahan dengan rendahnya kualitas hal ini dapat dilihat dari rapor pendidikan. Sehingga ini merupakan masalah yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Masih Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baru 8,58, hal ini menunjukkan rata-rata masyarakat Pesisir Selatan baru menyelesaikan pendidikan sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini merupakan masalah yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai wajib belajar sampai 12 tahun setara tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun jika di lihat dari persentase kenaikan angka rata-rata lama sekolah, Kabupaten Pesisir Selatan menempati urutan ke enam dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

c) Masih Rendahnya Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah sampai tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan baru 13,36. Hal ini menunjukkan rata-rata harapan masyarakat baru bisa menyelesaikan pendidikan sampai diploma belum mencapai sarjana. Hal ini harus jadi perhatian karena akan menentukan daya saing sumber daya manusia.

d) Masih Rendahnya Pengembangan Kebudayaan

Pembangunan pengembangan kebudayaan masih kurang, sehingga potensi kebudayaan yang ada belum dapat mendukung pengembangan sektor lain misalnya sektor pariwisata, merupakan salah satu tujuan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : mewujudkan pengembangan pembangunan budaya untuk mendorong sektor pariwisata, sehingga kebudayaan dapat dijadikan sumber perekonomian bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus budaya dapat dijadikan ajang promosi daerah ke negara lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A Latar Belakang
Berisikan tentang dasar-dasar penyusunan dokumen laporan kinerja yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan dokumen laporan kinerja;
- B Maksud dan Tujuan
Berisikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- C Dasar Hukum
Berisikan tentang dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan laporan kinerja;
- D Gambaran Umum Perangkat Daerah
Berisikan tentang gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- E Struktur Organisasi
Berisikan tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- F Sumber Daya Manusia
Berisikan tentang kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- G Isu Strategis
Berisikan tentang isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- H Sistematika Penulisan
Berisikan tentang isi dan bagian-bagian dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sehingga memudahkan dalam mendalami penyusunan dokumen laporan kinerja ini;
- I Ikhtisar Eksekutif
Berisikan ringkasan ringkas visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB II Perencanaan Kinerja

- A Rencana Strategis
Berisikan tentang Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
- B Perjanjian Kinerja
Berisikan tentang penyajian kinerja Ikhtisar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024
- C Indikator Kinerja Utama
Berisikan tentang indikator kinerja utama Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	A Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Tahun 2024 Berisikan tentang metode pengukuran kinerja Pendidikan dan Kebudayaan;
	B Hasil Pengukuran Kinerja dan Table Hasil Pengukuran Kinerja Berisikan tentang hasil pengukuran kinerja dan tabel pengukuran kinerja ;
	C Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Berisikan tentang capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024;
	D Akuntabilitas Keuangan Berisikan tentang anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024;
BAB IV	Penutup
	A Kesimpulan Berisikan tentang kesimpulan laporan kinerja tahun 2024;
	B Saran Berisikan saran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya.

I. Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 2 misi diantaranya misi kelima : **“Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing”** dengan tujuan yaitu : **“Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas** dalam pencapaian Indikator Kinerja : indeks literasi, indeks numerasi dan indeks karakter diri. Misi keempat : **“Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan”** dengan tujuan mewujudkan pengembangan pembangunan budaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam mendorong pencapaian indikator jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 urusan pariwisata).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam penyusunan renstra memuat visi dan misi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

Adapun Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah **"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera Maju dan Bermartabat Di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional"**. Untuk mewujudkan visi tersebut didukung oleh enam misi, yaitu:

- a) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- b) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- c) Memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
- d) Mewujudkan Kabupaten pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
- e) Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
- f) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pengelola urusan pendidikan dan kebudayaan adalah misi kelima dan keempat. Tujuan yang ingin dicapai misi kelima adalah **"terwujudnya pendidikan yang berkualitas"**, dengan sasaran : meningkatnya akses layanan bidang pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan.

Urusan kebudayaan mendukung misi keempat dengan tujuan yang ingin

dicapai adalah **“meningkatnya perekonomian bidang pariwisata”**, dengan sasaran : meningkatnya kontribusi kekayaan budaya dalam pembangunan pariwisata.

Kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada sektor pendidikan dan kebudayaan yaitu :

- a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah;
- b) Meningkatnya harapan lama sekolah;
- c) Mewujudkan pesisir selatan religius, sejahtera, cerdas, dan berakhlak (Pasisia Rancak);
- d) Meningkatnya fungsi dan peran lembaga adat dan agama;
- e) Terlaksananya pelestarian nilai-nilai seni dan budaya.

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Tahun 2024 meliputi 5 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 8 indikator kinerja beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100%
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,53 Tahun
		Rata- Rata Lama Sekolah	8,6 Tahun
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	3 orang
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	5 orang
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	77 %
		Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	100%

Tabel 2.2.
Anggaran Akhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	547.484.225.149	APBD
2	Pengelolaan Pendidikan	147.505.671.548	APBD & DAK
3	Pengembangan Kurikulum	290.025.170	APBD
4	Pengembangan Kebudayaan	1.385.791.994	APBD
5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	375.281.487	APBD
Jumlah		697.040.995.348	

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mengampu urusan kependidikan dan kebudayaan. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian 2 (dua) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu misi kelima dan keempat. Urusan pendidikan berada pada misi kelima yaitu : **"Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing"**

Tujuan : **"Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas"**

Sasaran : **"Meningkatkan Pemenuhan 3 Standar Pendidikan Nasional"**.

Urusan Kebudayaan mendukung pencapaian misi keempat yaitu : **"Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan"** dengan tujuan mewujudkan pengembangan pembangunan budaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam mendorong pencapaian indikator jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang merupakan Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 urusan pariwisata.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil Penilaian oleh Kemendagri melalui Aplikasi Inovation Government Award	100
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 7 sampai 18 tahun yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia 7 sampa 18 tahun pada tahun 2024	13,34 Tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
		Rata- Rata Lama Sekolah	Perbandingan antara lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Jumlah penduduk usia 25 tahun ke keatas pada Tahun 2024	8,28 Tahun
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Jumlah guru yang memperoleh prestasi tingkat provinsi atau nasional	3 orang
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Jumlah siswa yang memperoleh prestasi tingkat provinsi atau nasional	4 orang
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	Perbandingan antara jumlah cagar budaya yang di ajukan untuk diregistrasi dengan jumlah cagar budaya yang berhasil diregistrasi	77 %
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	Perbandingan antara jumlah WBTB yang di ajukan untuk dipatenkan dengan jumlah WTB yang berhasil dipatenkan	91%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel hasil pengukuran kinerja yang mana untuk penilaian tabel hasil pengukuran kinerja yang mana untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Urutan	Klasifikasi Penilaian	Predikat
I	85% - 100%	Sangat Baik
II	69% - 84%	Baik
III	53% - 68%	Cukup Baik
IV	<53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 Sesuai
Revisi Renstra Tahun 2021-2026

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)	A (84)	103,70
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	94	94,00
		Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,34	13,36	100,15
			Rata- Rata Lama Sekolah (tahun)	8, 28	8,58	103,62
		Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	3	2	66,67
			Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	4	4	100
2	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	77	75	97,40
			Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	91	100	109,89
Rata-rata capaian (%)						96,92

Sumber: Data Capaian Disdikbud Tahun 2024

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target A (81), realisasi A (84) atau capaian sebesar 103,70%;

2. Nilai Kematangan Inovasi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 100%, realisasi 94% atau capaian sebesar 94,00%;
3. Harapan lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 13,34 tahun, realisasi 13,36 tahun atau capaian sebesar 100,15%;
4. Rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 8,28 tahun, realisasi 8,58 tahun atau capaian sebesar 103,62%;
5. Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 3 orang, realisasi 2 orang atau capaian sebesar 66,67%;
6. Jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 4 orang, realisasi 4 orang atau capaian sebesar 100%;
7. Persentase Cagar budaya teregister yang menjadi tujuan wisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 77 %, realisasi 75% atau capaian sebesar 97,40%;
8. Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 91%, realisasi 100% atau capaian sebesar 109,89%;

C. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian misi 5 dan misi 4 yaitu : **"Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing dan "Mewujudkan Kabupaten pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan"**. Misi-misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam Target Kinerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, adapun capaian kinerja dijelaskan pada poin-poin berikut:

- a) Sasaran 1 yaitu : mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 menargetkan Nilai AKIP dengan nilai A (81), nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai A(84). Nilai ini lebih dari yang ditargetkan, sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 103,70 %. Pencapaian sasaran ini didukung oleh satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 547.484.225.149,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 508.080.742.349,- atau sekitar 93%, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Hasil Capaian Indikator, Program dan Anggaran pada Sasaran
Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	A	A	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	547.484.225.149	508.080.742.349

Tabel 3.4.
Hasil Realisasi dan Capaian indikator pada
Sasaran Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	A	A	A	100	100	100

b) Sasaran 2 yaitu : Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah dengan indikator nilai

kematangan inovasi perangkat daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 menargetkan nilai kematangan inovasi sebesar 100 , sementara penilaian yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan nilai 94 atau capaian sebesar 94%, berarti belum mencapai target yang ditetapkan, karena belum adanya kesepakatan MoU dari Kabupaten lain untuk mengadopsi aplikasi "Pronasa", karena hanya baru sebatas studi banding ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 217.353.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 212.389.752,- atau sekitar 97,71%, seperti tergambar pada tabel.

Tabel 3.5.
Hasil Capaian Indikator, Program dan Anggaran pada Sasaran
Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Nilai Kematangan Inovasi	%	100	94	94,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	547.484.225.149	508.080.742.349

Tabel 3.6.
Hasil Realisasi dan Capaian Indikator pada
Sasaran Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja Tahun 2022-2024

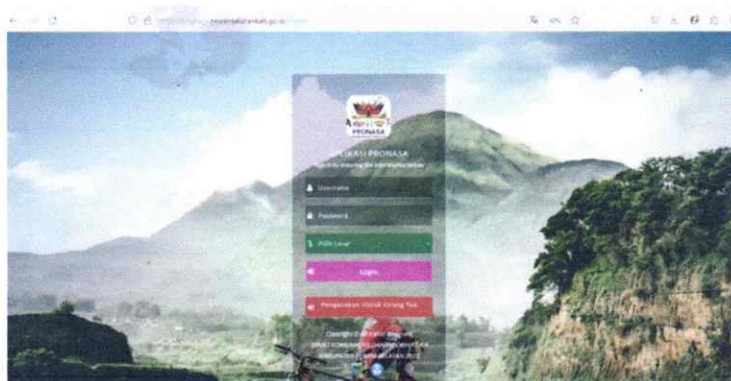
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai Kematangan Inovasi	%	-	94	94	-	94	94

Berikut beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melakukan efisiensi, efektivitas serta mencapai sasaran strategis yaitu :

a. Inovasi PRONASA

Inovasi ini dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada tahapan Implementasi. Tujuan inovasi ini menyediakan strategi pengembangan diri siswa yang terpadu pada kegiatan komunitas di nagari, terhubung dengan guru-guru sekolah sebagai pengendali pelaksanaannya. Sehingga pembentukan karakter siswa, prestasi dan peningkatan daya saing, berlangsung berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan dasar. Hasil dari inovasi ini adalah

1. Pembentukan karakter siswa;
2. Prestasi siswa bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik , untuk tahun 2022 siswa lolos ke tingkat provinsi sebanyak 5 orang dan lanjut ke tingkat Nasional sebanyak 1 orang, Untuk tahun 2024 lolos ke provinsi sebanyak 25 orang, dan lanjut ke tingkat Nasional sebanyak 2 orang, serta berhasil meraih juara 2 sains IPS sebanyak 1 orang. Bidang non akademik, Untuk tahun 2022 partisipasi peserta yang lolos ke tingkat provinsi sebanyak 14 orang, untuk tahun 2024 menjadi 51 orang dan berhasil meraih juara 1 sebanyak 1 orang.



b. Inovasi SIGURU

Inovasi ini dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tabel 3.8.
Hasil Realisasi dan Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2021	2022	2024	2021	2022	2024
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,35	13,36	100	100,15	100,14
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,43	8,58	100	101,93	103,62

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

- a) Dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.
- b) Hitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut. Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0. Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolahnya mengikuti rumus berikut.

Rumus mencari Rata-rata Lama Sekolah :

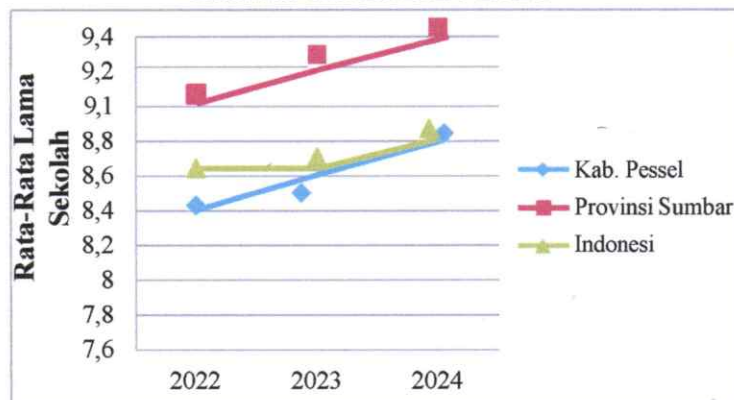
$$\text{Rata-rata lama sekolah} : \frac{\text{Lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}}$$

Tabel 3.9.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia
Tahun 2022-2024

No	Wilayah	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8,43	8,58	8,81
2	Provinsi Sumatera Barat	9,18	9,28	9,44
3	Indonesia	8,69	8,77	8,85

Sumber Data: BPS Tahun 2024

Grafik 3.1. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2024



Dari grafik perkembangan rata-rata lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 8,43 menjadi 8,81 pada tahun 2024, untuk rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat juga meningkat yaitu tahun 2022 sebesar 9,18 tahun menjadi 9,44 pada tahun 2024 dan rata-rata lama sekolah untuk Nasional juga meningkat yaitu tahun 2022 sebesar 8,69 tahun menjadi 8,85 pada tahun 2024.

Namun demikian angka rata-rata lama sekoah di Kabupaten Pesisir Selatan masih di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya

kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Berikut rumus perhitungan Harapan Lama Sekolah :

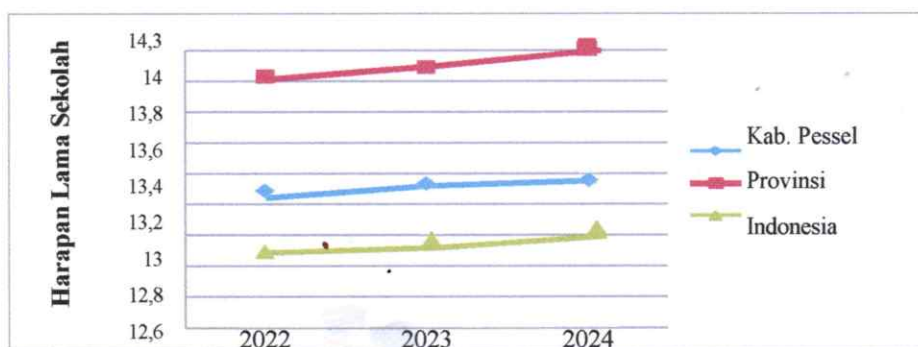
Harapan Lama Sekolah : $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 sampai 18 Tahun yang Bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 sampai 18 Tahun 2024}}$

Tabel 3.10.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia
Tahun 2022-2024

No	Wilayah	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,35	13,36	13,37
2	Provinsi Sumatera Barat	14,10	14,11	14,30
3	Indonesia	13,10	13,15	13,21

Sumber Data: BPS , Tahun 2024

Grafik 3.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2021-2024



Sumber Data: BPS Tahun 2024

Dari grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sebesar 13,35, nilai ini naik menjadi 13,37 tahun pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 14,10 tahun, nilai ini naik menjadi 14,30 pada tahun 2024 dan Nasional tahun 2022 sebesar 13,10 tahun, nilai ini naik menjadi 13,21 pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan di atas nasional, namun masih di bawah Provinsi Sumatera Barat.

d) Sasaran 4 yaitu : Meningkatnya Daya Saing Pendidikan dengan indikator Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional dan Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional. Tahun 2024 Jumlah Guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional ditargetkan sebanyak 3 orang dan tercapai 2 orang yaitu : 2 orang guru penerima penghargaan **Dewi Sartika Award** di tingkat nasional, hasil belum sesuai dengan yang ditargetkan atau tercapai sebesar 66,67 %. Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional ditargetkan 5 orang dan tercapai sebanyak 4 orang dengan rincian yaitu : 1 orang dari Olimpiade Sains Nasional bidang IPS (SMP), 2 orang dari O2SN cabang karate dan 1 orang dari cabang senam (SD), hasil ini juga belum sesuai dengan target atau hanya 80% tercapai. Pencapaian sasaran ini didukung oleh satu program yaitu program pengelolaan pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 147.505.671.548,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.729.731.703,- atau sekitar 57%, seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Hasil Capaian Indikator, Program dan
Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Akses
Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	3	2	67	Pengelolaan Pendidikan	147.505.671.548	83.729.731.703
2	Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	5	4	80			

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , Tahun 2024

Tabel 3.12.
Hasil Realisasi dan Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (Org)			Capaian (%)			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	-	3	2	-	100	67	Kedua Indikator tidak ditemukan data pembanding Nasional/ provinsi
2	Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	-	4	4	-	100	80	

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

- e) Sasaran 5 yaitu : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan 2 indikaor : Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata. Target masing-masing indikator tersebut adalah 75 % dan 90 %, dan kedua indikator tercapai sesuai target. Pencapaian sasaran ini didukung oleh dua program yaitu Program Pengembang Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.385.791.994,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.048.985.407,- atau sekitar 75,69%. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 375.281.487,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp365.094.377,- atau sekitar 97,28%, seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Hasil Capaian Indikator, Program dan
Anggaran pada Sasaran Meningkatkan Akses
Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	%	75	75	100	Program Pengembangan Kebudayaan	1.385.791.994	1.048.985.407
2	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	%	90	100	111,11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	375.281.487	365.094.377

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Tabel 3.14.
Hasil Realisasi dan Capaian Indikator pada
Sasaran Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	%	-	75	75	-	100	100	Kedua Indikator tidak ditemukan data pembandingan Nasional/provinsi
2	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	%	-	100	100	-	111,11	111,11	

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.15.
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Program / Kegiatan Menunjang
Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	697.040.995.348	593.482.370.291	85,14
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah			
3	Meningkatnya Akses Pendidikan			
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan			
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah			
Total		697.040.995.348	593.482.370.291	85,14

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 697.040.995.348,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp593.482.370.291,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 85,14 %.

Beberapa hambatan dan kendala daya serap APBD dan APBN dalam pencapaian kinerja, antara lain adalah :

1. Perencanaan program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif, dan integratif;
2. Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan proses lelang tidak mencukupi;
3. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memadai.

Meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja dalam meningkatkan daya serap APBD dan APBN, beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komprehensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya;

2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang;
3. Menambah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kompeten.

Efisiensi Sumberdaya pada LKj untuk Seluruh Indikator yang dijanjikan dalam PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah dilaksanakan yaitu :

1. Efisiensi waktu, dengan cara melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah disusun, kegiatan fisik dengan melakukan proses lelang lebih awal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak melampaui waktu pelaksanaan anggaran yang direncanakan;
2. Efisiensi anggaran, dengan cara melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan tujuan/ outcome yang dicapai dengan melakukan banyak hal dengan sekali kunjungan ke lapangan/ dengan menggunakan teknologi;
3. Efisiensi sumber daya/ sapras, dengan cara melaksanakan kegiatan/ pelayanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dapat mengefisiensi waktu dan biaya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

1. Capaian Sasaran

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026. Secara umum sasaran strategis sudah mencapai target, namun ada dua sasaran yang belum sesuai target yaitu : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dan Meningkatnya Daya Saing Pendidikan (1 indikator).

2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 8 yaitu : Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama sekolah, Nilai Kematangan Inovasi, Nilai AKIP, Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional, Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional, Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata, Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata. Secara umum capaian indikator sudah mencapai target, namun ada 2 dua indikator yang belum mencapai target yaitu : Nilai Kematangan Inovasi PD dan Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 593.482.370.291,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 85,14% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 697.040.995.348,-. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dan Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah yaitu 97,71 %, Meningkatnya Daya

Saing Pendidikan sebesar 94,7 %. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah sebesar 91,64 %, Meningkatnya Akses Pendidikan sebesar 73,62 %.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2021-2026 diperlukan kolaborasi semua stakeholder terkait melalui crosscutting program/ kegiatan;
2. Untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta indikator, maka diperlukan perencanaan program/ kegiatan yang tepat, akurat, efisiensi, dan efektif berdasarkan *Outcome* yang ingin dicapai mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dalam penyusunan program/ kegiatan sebaiknya disusun terlebih dahulu kerangka acuan kerja dan petunjuk operasional kegiatan, sehingga efisiensi waktu pelaksanaan dan capaian realisasi anggaran dapat diwujudkan;
4. Dalam penentuan target indikator sasaran sebaiknya mengacu pada ketersediaan sumber daya yang tersedia baik anggaran maupun sumber daya manusia;
5. Dalam penentuan target indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada definisi operasional dan cara/ rumus untuk menghitung indikator tersebut, sehingga target yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sampai ke staf selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran : Penghargaan 2024

A. Guru Berprestasi



Penghargaan Dewi Sartika Award Tingkat Nasional Tahun 2024

B. Murid Berprestasi



Penghargaan Lomba Olimpiade Sains Nasional, Peringkat II Bidang IPS Tahun 2024



Penghargaan O2SN Cabang Karate, Peringkat II Tkt. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Penghargaan O2SN Cabang Senam, Peringkat II dan III Tkt. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024